

Analisis Kontribusi Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Kupang

Darwin Yopie Kefi¹, Melda M Poeh², Ronald E. Renoald³

^{1,2,3} Jurusan administrasi bisnis politeknik negeri Kupang NTT, Indonesia

(Diterima 10-10-2022; Disetujui 07-11-2022)

E-mail: yopiedarwin1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor usaha mikro apa saja yang yang dikelola oleh penerima manfaat dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan untuk mengetahui sektor-sektor potensi unggulan lokal di daerah yang perlu didorong dan dikembangkan dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Kupang. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa Location Quotient dalam mengidentifikasi sektor dan sub sektor unggulan di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam sektor yang menjadi jenis usaha dari masyarakat penerima bantuan program dana PEM, yakni sektor perdagangan, peternakan, pertanian, perindustrian, jasa dan perikanan, dan hasil analisis LQ untuk sektor unggulan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah sektor perdagangan, sektor perindustrian dan sektor jasa. sedangkan sektor non unggulan adalah sektor peternakan, sektor pertanian dan perikanan.

Kata Kunci: Ekonomi Bergulir, PEM, PEL.

PENDAHULUAN

Di era otonomi dan pengaruh globalisasi saat ini, pemerintah sebagai manajer, fasilitator dan stimulator sesuai dengan semangat otonomi daerah dan reformasi, harus bisa berkomitmen dalam penciptaan iklim kerja yang kondusif bagi pengembangan ekonomi produktif masyarakat berskala mikro. Laporan hasil studi dan hasil kajian dalam[1] menunjukkan bahwa dunia usaha di Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menghadapi banyak kendala dan hambatan dalam menjalankan usahanya, hambatan tersebut adalah sulitnya mendapatkan lahan murah, ketidakterediaan infrastruktur yang memadai, terbelitnya pengurusan perijinan, rendahnya akses terhadap sumber dana, sulitnya mengakses informasi pasar dan hambatan-hambatan lainnya yang berdampak pada terganggunya perkembangan usaha, menghambat minat investasi yang bermuara pada ketidakmampuan daerah dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang kerja yang baru, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Salah satu konsep dalam pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh sejumlah daerah di Indonesia termasuk yaitu konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Konsep PEL yakni memberi tekanan pada kekuatan untuk memobilisasi sumber daya, kapasitas dan ketrampilan yang terdapat dan dimiliki oleh lokal (daerah) untuk dimanfaatkan bagi tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan[1]. "PEL merupakan pendekatan alternatif yang dipilih dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana aspek lingkungan, social dan ekonomi saling bersinergi dalam pembangunan berskala lokal. PEL yang berproses secara demokratis dengan dukungan kemitraan multipihak yang kuat, diharapkan mampu mengelola sumber daya lokal yang ada guna menciptakan bukan hanya pertumbuhan ekonomi melainkan juga keadilan ekonomi, terutama bagi kelompok marginal[2]. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di Kota Kupang sebagai daerah barometer pembangunan di NTT harus memprioritaskan program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang ada di Kota Kupang untuk meningkatkan daya saing dengan daerah lain. Kota Kupang memiliki banyak sekali potensi produk-produk unggulan yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti pertanian, peternakan, perikanan, pangan lokal, dan kerajinan tenun dan kuliner-kuliner lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Selain itu, menurut (Munir, 2007) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan

SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal[5]. Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007, h.103-123) dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha; 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; 3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal[5].

Berbagai kebijakan telah disusun dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk mendorong konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan salah satu upaya yang dilakukan adalah bantuan dana bergulir yang dikenal dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Program PEM telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2013, program PEM bertujuan untuk menyediakan bantuan modal untuk menunjang pengembangan ekonomi produktif masyarakat, meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pertumbuhan wirausaha yang produktif[3]. Program dana PEM ini yaitu penyaluran dana ekonomi bergulir dalam bentuk pemberian pinjaman jangka pendek tanpa bunga kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro. Dana ekonomi bergulir ini diharapkan membantu masyarakat dalam meningkatkan kinerja usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat. Sasaran dari pengelolaan dana PEM ini adalah usaha ekonomi produktif berskala mikro yang dikelola bersama atau perorangan, dengan jenis usaha adalah pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian dan perdagangan serta jenis-jenis usaha produktif lainnya[3]. Pengertian dana bergulir menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 yaitu merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah; dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan; dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA); dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah dan selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); serta pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir[4]. Penyaluran dana bergulir ini dilakukan oleh satuan kerja pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut: satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercatat dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA); satuan kerja mengajukan pencairan dana melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain; dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan; serta yang terakhir satuan kerja melakukan pengelolaan dan melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut[4].

State of the Art (SOTA) penelitian ini diambil dari beberapa jurnal penelitian terbaru sebagai panduan, yang akan dijadikan rujukan dan perbandingan dalam penelitian ini, adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Hasil dari penelitian [5] menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran memberikan dampak yang positif dimana dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini tercipta lapangan kerja baru sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hasil penelitian [6] menunjukkan dampak penyaluran dana PEM terhadap peningkatan pendapatan penerima bantuan terlihat nyata, walaupun sebagian besar pendapatan masih digunakan untuk konsumsi (51,31%) dan sisanya digunakan untuk menambah modal usaha (48,69%). Dari segi prinsip pemberdayaan, dengan adanya tambahan modal usaha melalui pendapatan tersebut, para penerima dana PEM mulai memberdayakan usahanya dengan baik. Namun demikian, pilihan jenis usaha belum bervariasi (fokus pada usaha dagang), serta perencanaan usaha penatausahaan keuangan belum memadai. Karena itu direkomendasikan agar perbaikan dalam implementasi dana PEM fokus pada perluasan pilihan usaha, serta perbaikan dalam perencanaan dan penatausahaan keuangan. Hasil penelitian[7] menunjukkan bahwa Pelaksanaan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Oebobo menghasilkan dampak positif meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas

usaha masyarakat, kemandirian masyarakat. Penelitian [8] menyebutkan bahwa sector yang paling potensial dikembangkan di Kabupaten Gresik yaitu, sector industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta sector pertambangan dan penggalian. Sedangkan dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dilihat dari RPJPD dan RPJMD serta alokasi APBD cenderung memprioritaskan pada sector yang kurang potensial seperti perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Maka, pemerintah Kabupaten Gresik perlu memprioritas program pembangunan maupun pengalokasian anggarannya pada sector unggulan. Penelitian [9] menunjukkan bahwa sector yang potensial dan berdaya saing untuk dikembangkan di Kabupaten Kerinci adalah sector pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta sector informasi dan komunikasi, selain sector pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi prioritas daerah dalam pengembangan potensi ekonomi local di Kabupaten Kerinci. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kerinci perlu memprioritas program pembangunan maupun pengalokasian anggarannya pada sector unggulan/potensial tersebut.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu di atas belum menunjukkan hubungan atau kontribusi dari variabel Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji hubungan kedua variabel penelitian.

Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah sejauhmana peran atau kontribusi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sector-sector usaha mikro apa saja yang dikelola oleh penerima manfaat dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan untuk mengetahui sector-sector potensi unggulan lokal di daerah yang perlu didorong dan dikembangkan dalam mendukung Pengembangan Ekonomi lokal di Kota Kupang. Hasil kajian Pengembangan Ekonomi Lokal diyakini akan memberi banyak manfaat, bukan hanya bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pengembangan produk unggulan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kerjasama kemitraan serta mengurangi jumlah kemiskinan, tetapi juga bagi pemerintah daerah sebagai informasi yang akurat dalam upaya penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Lokal secara berkesinambungan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, secara empiris mengkaji tentang peran atau kontribusi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Kupang. Sumber data yang digunakan yaitu data yang diolah dari penelitian berupa dokumen dari badan pusat statistik, laporan jenis usaha dan data-data lain terkait penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Analisis data didahului dengan mengidentifikasi sector-sector yang usaha ekonomi mikro berskala lokal penerima dana PEM, dan teknik analisa Location Quotient (LQ) dalam mengidentifikasi sector dan sub sector unggulan di Kota Kupang. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk pembahasan secara deskriptif kemudian disimpulkan dan menjadi rujukan informasi yang akurat bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan akademisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi NTT yang terletak di bagian tenggara Provinsi. Secara astronomis, Kota Kupang terletak antara 10° 36' 14'' - 10° 39' 58'' Lintang Selatan dan 123° 32' 23'' - 123° 37' 01'' Bujur Timur. Kota Kupang yang memiliki luas 180,27 Km² terdiri dari 6 kecamatan. Secara geologis wilayah ini terdiri dari pembentukan tanah dari bahan keras dan bahan non vulkanis. Bahan-bahan mediteran/ rencina/liotsol terdapat di semua kecamatan. Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2020 adalah 442.752 jiwa, yang tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 86,91 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,22 km². Kecamatan dengan daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di Maulafa sedangkan kecamatan dengan daerah terendah di atas permukaan laut adalah Kota Lama. Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah:

- Timur: Kecamatan Kupang Tengah dan Taebenu Kabupaten Kupang
- Barat: Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau
- Utara: Teluk Kupang

- Selatan: Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese

Identifikasi Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang disalurkan dan bergulir pada tahun 2017-2020 dengan jumlah mencapai Rp. 37.341.000.000, dan jumlah pelaku usaha mencapai 10.168 orang pelaku usaha yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah Kota Kupang. Adapun realisasi anggaran pelaku usaha per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Rekapitulasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang

No	Kecamatan	Penyaluran Dana PEM (I s/d III)	
		Jumlah Dana	
1	Kelapa Lima	Rp	3,621,000,000
2	Kota Lama	Rp	6,904,000,000
3	Oebobo	Rp	5,212,500,000
4	Kota Raja	Rp	5,853,500,000
5	Alak	Rp	9,000,000,000
6	Maulafa	Rp	6,750,000,000
TOTAL		Rp	37,341,000,000.00

Sumber: Bappeda Kota Kupang, April 2022, (Diolah)

Tabel 2. Data Rekapitulasi Unit Usaha 2019-2021

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha	Jenis Usaha						Total
			Perdagangan	Peternakan	Pertanian	Perindustrian	Jasa	Perikanan	
1	Kelapa Lima	997	656	88	2	28	112	111	997
2	Kota Lama	1376	995	20	0	34	236	91	1376
3	Oebobo	1632	1164	183	3	49	211	22	1632
4	Kota Raja	1492	1004	167	11	69	223	18	1492
5	Alak	2506	1421	610	55	70	205	145	2506
6	Maulafa	2165	1158	526	76	135	239	31	2165
TOTAL		10168	6398	1594	147	385	1226	418	10168

Sumber: Bappeda Kota Kupang, April 2022 (Diolah)

Berdasarkan data yang ada pada tabel 2 di atas, diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang pada tahun 2019-2021 diperuntukan untuk usaha mikro kecil dengan jenis usaha perdagangan, peternakan, pertanian, perindustrian, jasa dan perikanan. dengan jumlah total pelaku usaha berjumlah 10.168 pelaku usaha.
- 2) Sektor usaha yang paling banyak dilakukan adalah dari sektor perdagangan dengan jumlah pelaku usaha berjumlah 6.398 (63%); peternakan 1.594 (16%); jasa 1.226 (12%); perikanan 418 (4%); perindustrian 385 (4%) dan pertanian 147 (1%) dari total pelaku usaha yang ada.

a. Analisis Pengembangan Ekonomi Lokal Unggulan di Kota Kupang

Untuk mengetahui sektor komoditas yang paling potensial untuk dikembangkan atau mencari sektor basis (unggulan) sebagai potensi daerah dapat ditelaah dari komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana dalam menelaah PDRB dapat diketahui sektor basis dan bukan basis antara lain menggunakan metode analisis *location quotient (LQ)*. Analisis *Location Quotient (LQ)*, yaitu untuk mengetahui sector mana yang ada di suatu daerah yang menjadi unggulan (komoditas) dan sector mana yang tidak menjadi unggulan (atau pertumbuhannya negatif/defisit).

Pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan potensi daerah salah satunya dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lebih lanjut lagi dijelaskan rumus analisis LQ adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum Q_i/S_i}{\sum N_i/N} \dots (1)$$

Keterangan:

LQ = *Location Quontien* sektor wilayah studi (Kota Kupang)

S_i = Pendapatan sektor di wilayah studi (Kota Kupang)

S = Pendapatan total di wilayah studi (Kota Kupang)

N_i = Pendapatan sektor di wilayah refrensi (Provinsi NTT)

N = Pendapatan total di wilayah refrensi (Provinsi NTT)

- a. LQ > 1 sektor komoditas unggulan dan potensial untuk dikembangkan.
- b. LQ < 1: bukan merupakan sektor komoditas unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan
- c. LQ = 1: peranan sektor di wilayah kota sama dengan pada tingkat propinsi

Hasil analisis *Location Quantient (LQ)* di Kota Kupang pada Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Analisis *Location Quotient (LQ)* Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Location Quanteint			
		2019	2020	2021	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.079	0.080	0.079	0.080
2	Pertambangan dan Penggalian	0.070	0.083	0.083	0.079
3	Industri Pengolahan	1.245	1.239	1.232	1.239
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.713	1.672	1.718	1.701
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.021	2.035	2.121	2.059
6	Konstruksi	1.438	1.452	1.423	1.438
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.305	1.331	1.307	1.314
8	Transportasi dan Pergudangan	1.548	1.436	1.427	1.470
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.773	2.773	2.758	2.768
10	Informasi dan Komunikasi	1.675	1.731	1.799	1.735
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.705	1.708	1.730	1.714
12	Real Estate	1.242	1.265	1.246	1.251
13	Jasa Perusahaan	2.321	2.152	2.176	2.216
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.628	0.633	0.625	0.628
15	Jasa Pendidikan	1.531	1.551	1.574	1.552
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.844	1.873	1.881	1.866
17	Jasa lainnya	1.711	1.787	1.819	1.772

Data Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 sektor yang mempunyai nilai LQ>1, hal ini berarti bahwa 14 sektor tersebut merupakan sector unggulan atau basis yang potensial untuk dikembangkan. Data di atas juga menunjukkan bahwa terdapat 3 sektor yang paling potensial untuk dikembangkan yakni sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai LQ rata-rata adalah 2.768, sektor jasa perusahaan dengan nilai LQ rata-rata adalah 2.216 dan sektor unggulan ketiga yang paling potensial di Kota Kupang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai LQ rata-rata adalah 2.059. Jika sektor-sektor tersebut mendapat prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Kupang maka sektor-sektor tersebut bisa menjadi potensi ekonomi yang sangat besar di Kota Kupang.

b. Analisis Kontribusi Program PEM dalam PEL di Kota Kupang.

Berdasarkan keseluruhan gambaran tingkat perkembangan serta hasil analisis dan peran sektor ekonomi regional di Kota Kupang, maka diperlukan upaya nyata melalui pengembangan kebijakan

dan strategi yang mampu mendorong percepatan RPJMD Kota Kupang 2017-2022. Untuk itu prioritas kepada sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan yang tinggi merupakan aspek penting dan rasional untuk dapat dilaksanakan. Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tercermin melalui sektor-sektor yang dikembangkan seperti perdagangan; peternakan; pertanian; perindustrian; jasa dan perikanan.

Pengembangan sektor perdagangan dengan hasil LQ yaitu 1.31, perindustrian dengan nilai LQ yaitu 1.23, serta jasa (jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya) memiliki nilai $LQ > 1$, dinilai sangat tepat karena berdasarkan hasil LQ mendapatkan nilai > 1 , menandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan masuk kategori sektor unggulan. Oleh karena itu, ketiga sektor potensial tersebut perlu didorong dan dikembangkan untuk pengembangan ekonomi di Kota Kupang. Sedangkan, prioritas sektor peternakan, perikanan dan pertanian dinilai belum tepat diprioritaskan karena berdasarkan hasil analisis LQ, ketiga sektor ini mendapatkan nilai rata-rata $LQ < 1$, yang menandakan bahwa sektor tersebut bukan sektor unggulan.

Pengembangan program dana PEM yang saat ini telah bergulir tentunya juga harus memperhatikan dan menyelaraskan dengan prioritas pembangunan ekonomi Kota Kupang. Memprioritaskan sektor unggulan merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan dan dipertahankan, akan tetapi hal ini bukan berarti mengabaikan potensi-potensi dari sektor ekonomi lain yang tidak menjadi unggulan. Sektor yang bukan sektor unggulan sekalipun tetap perlu dikembangkan dan diperhatikan. Oleh karena itu, Pemerintah harus kreatif merencanakan pembangunan yang dapat mensinergikan semua sektor-sektor unggulan (basis) dan sektor-sektor non unggulan yang tidak potensial agar sektor non unggulan tersebut tetap berkontribusi dalam mendorong percepatan kemajuan pembangunan ekonomi di Kota Kupang secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi maka sektor-sektor yang menjadi jenis usaha dari penerima manfaat program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang adalah sektor perdagangan, peternakan, pertanian, perindustrian, jasa dan perikanan. dan hasil analisis menunjukkan bahwa sektor unggulan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah sektor perdagangan, sektor perindustrian dan sektor jasa. sedangkan sektor non unggulan adalah sektor peternakan, sektor pertanian dan perikanan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan kepada Pemerintah Kota Kupang agar sebaiknya lebih meningkatkan pengembangan ekonomi pada sektor yang menjadi sektor unggulan. Serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dalam merencanakan Pengembangan Ekonomi Lokal agar sektor non unggulan bisa menjadi sektor unggulan pada masa mendatang dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Rahma, *Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, 2012.
- S. Dina Mariana, *Buku Panduan Pelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) untuk Perbaikan Layanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat* Yogyakarta: IRE, 2019.
- Peraturan Daerah Kota Kupang No. 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*
- KSAP, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 (Akuntansi Dana Bergulir)*. Jakarta: KSAP, 2008.
- E. A. Susanti, "Pengembangan ekonomi lokal dalam sektor pertanian (studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)," Brawijaya University, 2013.
- F. O. Fanggal and R. P. C. Fanggal, "Dampak Implementasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat," *Jurnal Inovasi Kebijakan*, vol. 1, no. 1, pp. 1-17, 2016.
- S. D. A. P. Bida, N. Tameno, and N. T. Kiak, "Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Oebobo Kota Kupang," *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, vol. 18, no. 2, pp. 46-52, 2021.
- N. Husna, "Analisis pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah di Kabupaten Gresik," Brawijaya University, 2013.

M. Hastin, "Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Kerinci," *Jurnal Akrab Juara*, vol. 6, no. 1, pp. 16-29, 2021.